

# KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2019-2024

Volume 8, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT



# **KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2019-2024**

Volume 8, 2025



# KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

## 2019–2024

### Volume 8, 2025

Katalog : 1306017.32  
ISSN : 2655-2248  
Nomor Publikasi : 32000.25002  
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : xii+54 halaman

**Penyusun Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Pembuat Kover:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Penerbit:**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Sumber Ilustrasi:**

canva.com

*"Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat."*



**KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA BARAT  
2019–2024  
Volume 8, 2025**

**Tim Penyusun:**

**Penanggung Jawab Umum**

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

**Penanggung Jawab Teknis**

Isti Larasati Widiastuty, S.ST, M.P

**Penulis Naskah**

Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat

Sulthan Hanifa Nefertiti, S.ST

**Penyunting**

Isti Larasati Widiastuty, S.ST, M.P

Raifa Mukti, S.Si, M.E

Partinah, S.A.P

**Penata Letak**

Fahmi Ali Hasymi Juliansyah S.Si, M.Sc, M.T

**Pembuat Infografis**

Solihin, S.A.P





## KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan berkesinambungan. BPS Provinsi Jawa Barat berupaya menyajikan data terkait kemiskinan tersebut, salah satunya melalui publikasi "Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2024".

Publikasi ini berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi mendatang.

Bandung, Februari 2025  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Barat



**Darwis Sitorus, S.Si, M.Si**



## DAFTAR ISI

### **KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2019–2024 Volume 8,2025**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan Penulisan .....	4
1.3 Sumber Data .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT .....	7
2.1 Perubahan Garis Kemiskinan.....	9
2.2 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Kemiskinan.....	10
2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan .....	12
2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan .....	13
BAB 3 KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT .....	15
3.1 Karakteristik Demografi .....	17
3.1.1 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga.....	17



Halaman

3.1.2 Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga.....	18
3.1.3 Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga .....	20
3.2 Karakteristik Sosial Ekonomi.....	21
3.2.1 Tingkat Pendidikan.....	21
3.2.2 Karakteristik Ketenagakerjaan .....	22
3.2.3 Pengeluaran per Kapita per Bulan .....	26
3.3 Karakteristik Perumahan.....	27
3.3.1 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal .....	27
3.3.2 Jenis Lantai, Dinding dan Atap Terluas.....	29
3.3.3 Penggunaan Jamban .....	32
3.3.4 Sumber Air .....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
DAFTAR LAMPIRAN .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) dan Perubahan Garis Kemiskinan (persen) Jawa Barat, 2019–2024 .....	9
Gambar 2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Tingkat Kemiskinan (persen) Jawa Barat, 2019–2024 .....	11
Gambar 3	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Jawa Barat, 2019–2024 .....	12
Gambar 4	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	13
Gambar 5	Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Jawa Barat, 2019–2024 .....	14
Gambar 6	Rata–rata Umur Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (tahun), 2024 .....	18
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	19
Gambar 8	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (orang), 2024 .....	20
Gambar 9	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	22
Gambar 10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	23
Gambar 11	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	25



## Halaman

Gambar 12	Persentase Penggunaan Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	27
Gambar 13	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	28
Gambar 14	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2024 .....	29
Gambar 15	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	30
Gambar 16	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	31
Gambar 17	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	32
Gambar 18	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (rupiah/kapita/bulan), 2019–2024 .....	39
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (ribu orang), 2019–2024.....	40
Lampiran 3	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019–2024.....	41
Lampiran 4	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019–2024 .....	42
Lampiran 5	Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019–2024 .....	43
Lampiran 6	Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (tahun), 2024 .....	44
Lampiran 7	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	45
Lampiran 8	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	46
Lampiran 9	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja di Jawa Barat, 2024 .....	47
Lampiran 10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	48

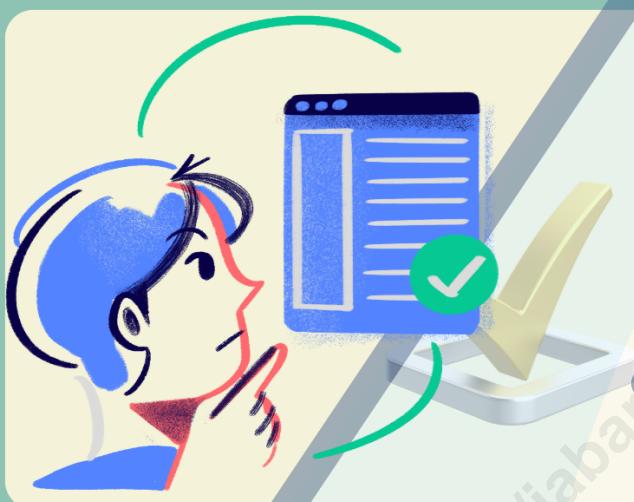


Halaman

Lampiran 11 Persentase Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Miskin Menurut Penggunaan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	49
Lampiran 12 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Penggunaan Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	50
Lampiran 13 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, 2024 .....	51
Lampiran 14 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, 2024 .....	52
Lampiran 15 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	53
Lampiran 16 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama dan Air Layak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024 .....	54

# PENDAHULUAN

## BAB 1



### LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan

### UKURAN KEMISKINAN

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*)



Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan

### SUMBER DATA

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019–2024



## 1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan berkesinambungan. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya merupakan instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan sebagai input dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan antardaerah, serta menentukan target pengurangan penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976–1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).



Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), mulai tahun 2011–2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV dan mulai tahun 2015 hingga saat publikasi ini disusun menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran yang dikumpulkan setiap Bulan Maret.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Seseorang yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan maka itulah yang disebut dengan penduduk miskin.

## 1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan publikasi ini adalah:

- a. Untuk menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2019–2024.



- b. Untuk menyajikan karakteristik rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota tahun 2024.

## 1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Jumlah target sampel Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya (2019–2024) sekitar 23.960 rumah tangga.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Publikasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019–2024 disajikan dalam tiga bab:

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, dan sumber data yang digunakan serta sistematika penulisan.

### **Bab II Kondisi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**

Membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, serta keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat.

### **Bab III Karakteristik Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**

Membahas karakteristik kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencakup karakteristik demografi, sosial ekonomi dan perumahan.



# BAB 2

# KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

## PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN



Garis kemiskinan di Jawa Barat meningkat sebesar **5,82 persen** dari **Rp 495.229** per kapita per bulan pada **Maret 2023** menjadi **Rp 524.052** per kapita per bulan pada **Maret 2024**

## JUMLAH DAN TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2024 sebesar **7,46 persen** dengan penduduk miskin sebanyak **3,85 juta orang**.

**Kabupaten Bogor** dan **Kota Banjar** memiliki jumlah penduduk miskin yang paling banyak dan paling sedikit di Jawa Barat yaitu masing-masing sebanyak **446,79 ribu orang** dan **11,16 ribu orang**



## INDEKS KEDALAMAN ( $P_1$ ) DAN INDEKS KEPARAHAAN ( $P_2$ ) KEMISKINAN



**Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )** Jawa Barat pada Maret 2024 sebesar **1,21** dan **Indeks Keparaahan Kemiskinannya ( $P_2$ )** sebesar **0,29**. Sementara **Kabupaten Indramayu** mempunyai **Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi** di Jawa Barat yaitu **2,05** dan mempunyai **Indeks Keparaahan Kemiskinan tertinggi** yaitu **0,54**

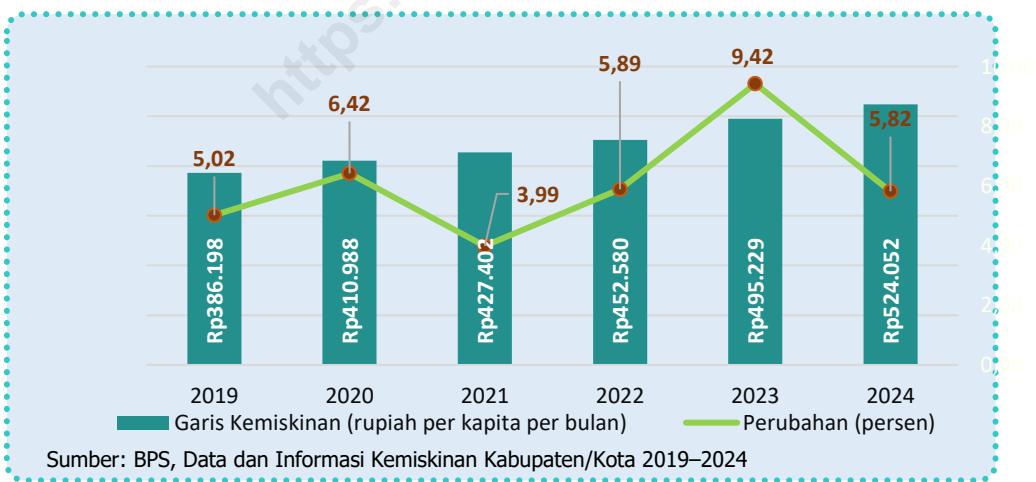


## BAB 2

# KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

### 2.1 Perubahan Garis Kemiskinan

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan batasan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) yang kemudian diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan. Selama kurun waktu Maret 2019–Maret 2024, garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan (Gambar 1). Garis kemiskinan meningkat dari Rp495.229 per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp524.052 per kapita per bulan pada Maret 2024 (naik 5,82 persen).



Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019–2024

**Gambar 1 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) dan Perubahan Garis Kemiskinan (persen) Jawa Barat, 2019–2024**

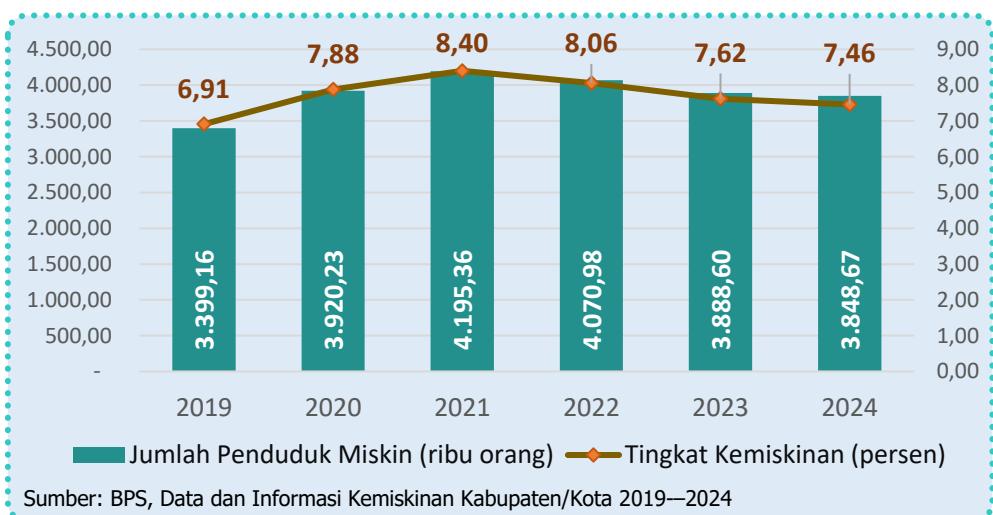


Selama enam tahun terakhir Kota Depok memiliki garis kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Pada Maret 2024 garis kemiskinan Kota Depok sebesar Rp843.893 per kapita per bulan. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah, yaitu sebesar Rp393.464 per kapita per bulan (Lampiran Tabel 1).

## 2.2 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Kemiskinan

Pada periode Maret 2019–Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami peningkatan. Pada Maret 2019–Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat naik dari 3,40 juta orang (Maret 2019) menjadi 3,92 juta orang (Maret 2020). Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat kembali meningkat menjadi 4,20 juta orang (naik 275,11 ribu orang) seperti terlihat pada Gambar 2. Sedangkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan menjadi 4,07 juta orang (turun 124,36 ribu orang). Selanjutnya pada Maret 2023 turun lagi menjadi 3,89 juta orang dan kondisi terakhir pada Maret 2024 turun menjadi 3,85 juta orang.

Dilihat dari sisi tingkat kemiskinannya, pada kurun waktu 2019–2021 mengalami peningkatan akibat dampak Covid-19. Pada Maret 2019–2020 tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami kenaikan dari 6,91 persen menjadi 7,88 persen. Kemudian pada Maret 2021 tingkat kemiskinan Jawa Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 8,40 persen. Baru mulai tahun 2022 terlihat mengalami penurunan menjadi 8,06 persen, lalu pada tahun 2023 menjadi 7,62 persen dan terakhir kondisi Maret 2024 menjadi 7,46 persen (Gambar 2). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kondisi ekonomi Jawa Barat *pasca* pandemi Covid-19 sudah mulai membaik.



**Gambar 2 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Tingkat Kemiskinan (persen) Jawa Barat, 2019–2024**

Berdasarkan Lampiran Tabel 2 dapat kita lihat selama kurun waktu tahun 2019–2021 jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terus meningkat namun pada tahun 2022 mulai mengalami penurunan kembali hingga kondisi terakhir Maret 2024. Selama periode 2019–2024 Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin yang paling banyak dan Kota Banjar memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit di Provinsi Jawa Barat. Pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor adalah sebesar 446,79 ribu orang, sedangkan di Kota Banjar sebanyak 11,16 ribu orang.

Jika kita lihat persentase penduduk miskin (lampiran tabel 3) pada kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 2019–2021 juga mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2022 hingga 2024 terlihat adanya penurunan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu. Tiga kabupaten/kota dengan persentase tertinggi di Jawa Barat memiliki perbedaan persentase yang cukup tipis, yaitu Kabupaten Indramayu (11,93 persen), Kabupaten Kuningan (11,88 persen) dan Kota Tasikmalaya (11,10 persen).



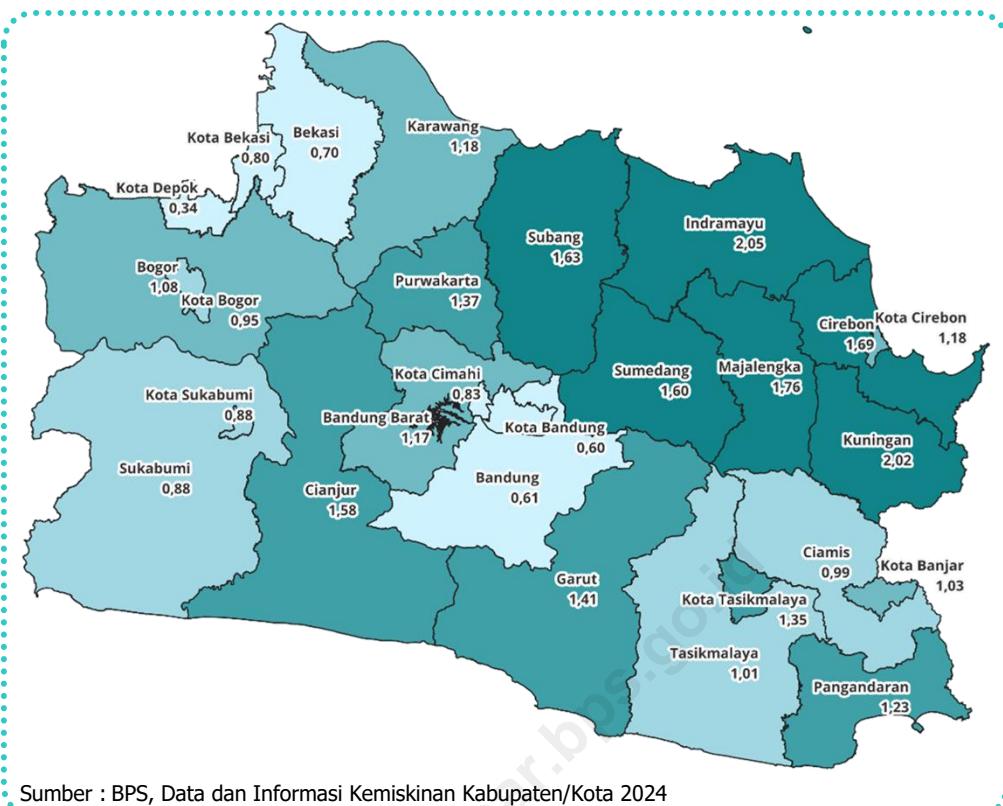
## 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index = P<sub>1</sub>*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2019-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jawa Barat secara berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021 kemudian menurun pada periode 2022-2023, lalu sedikit mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 (Gambar 3).



**Gambar 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) Jawa Barat, 2019–2024**

Menurut kabupaten/kota, pada tahun 2024 Kota Depok memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah yaitu 0,34. Sementara itu, Kabupaten Indramayu mempunyai Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu 2,05. Hal ini mengindikasikan bahwa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Indramayu cenderung lebih sulit jika dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Barat karena secara rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Indramayu pada tahun 2024 memiliki jarak yang lebih jauh di bawah garis kemiskinan.



Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024

**Gambar 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan, Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Maret 2024**

## 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ). Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait pengentasan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.



Pada Gambar 5, bila dilihat perkembangan selama periode 2019-2024, Indeks Keparahan Kemiskinan di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Nilai  $P_2$  tertinggi terjadi pada tahun 2021 (0,38). Namun kondisi terakhir pada Maret 2024 mencapai 0,29. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa jarak antar penduduk miskin dibandingkan tahun 2021 mengalami perbaikan.



**Gambar 5 Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Jawa Barat, 2019–2024**

Perubahan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota juga cenderung variatif. Jika dibandingkan kondisi tahun 2024 dengan keadaan tahun sebelumnya, ada sebanyak 14 kabupaten/kota mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 13 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Kota Depok merupakan kabupaten/kota di Jawa Barat dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan terendah yaitu 0,07. Sementara itu, Kabupaten Indramayu mencapai Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi yaitu 0,54. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar penduduk miskin di Kabupaten Indramayu lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

# BAB 3

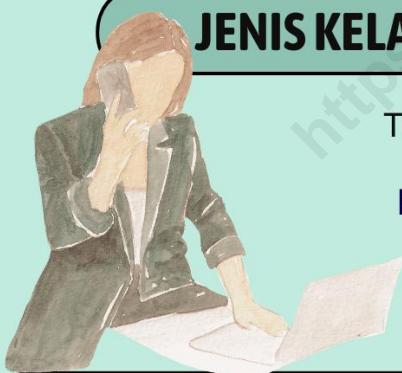
# KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA BARAT

## RATA-RATA UMUR KEPALA RUMAH TANGGA

Rata-rata umur kepala rumah tangga miskin di Jawa Barat pada tahun 2024 adalah **50 tahun**. Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten dengan rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tertinggi yaitu **54 tahun** sedangkan yang terendah di Kabupaten Bekasi yaitu **46 tahun**



## JENIS KELAMIN KEPALA RUMAH TANGGA



Terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan di atas **13 persen**, yaitu: Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung.

## RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Jawa Barat sekitar **5 orang**. Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin paling sedikit yaitu **3 orang**.





# BAB 3

## KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA BARAT

### 3.1 Karakteristik Demografi

Identifikasi karakteristik demografi penduduk miskin diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kemiskinan. Karakteristik demografi yang disajikan pada publikasi ini meliputi rata-rata umur kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga.

#### 3.1.1 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga

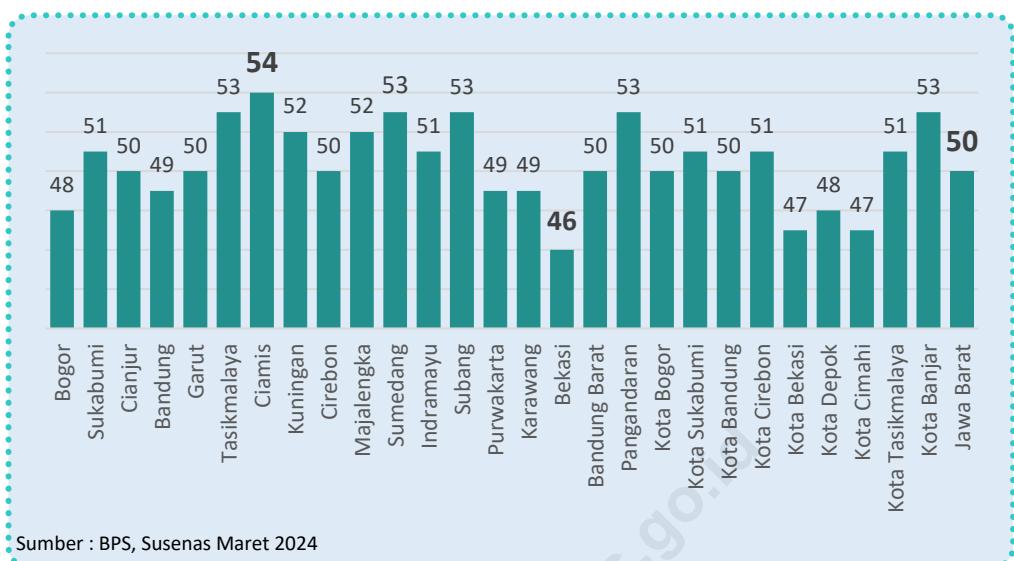
Produktivitas seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh umur. Umumnya seseorang yang berada pada usia produktif mampu menghasilkan lebih banyak tingkat *output* dibandingkan dengan orang yang ada di luar usia kerja. Usia juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi kerja dimana akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi.

Rata-rata umur Kepala Rumah Tangga (KRT) miskin di Jawa Barat tahun 2020 adalah 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga miskin mungkin berada dalam usia mendekati pensiun atau sudah melewati usia produktif puncak mereka. Ini bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk mencari nafkah atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Ciamis mempunyai rata-rata umur KRT miskin tertinggi yaitu 54 tahun, sedangkan yang terendah di Kabupaten Bekasi yaitu 46 tahun.



Semakin muda usia KRT semakin besar peluang untuk diberdayakan, sehingga harapannya mereka akan lebih cepat untuk keluar dari kemiskinan.



Sumber : BPS, Susenas Maret 2024

**Gambar 6 Rata-rata Umur Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (tahun), 2024**

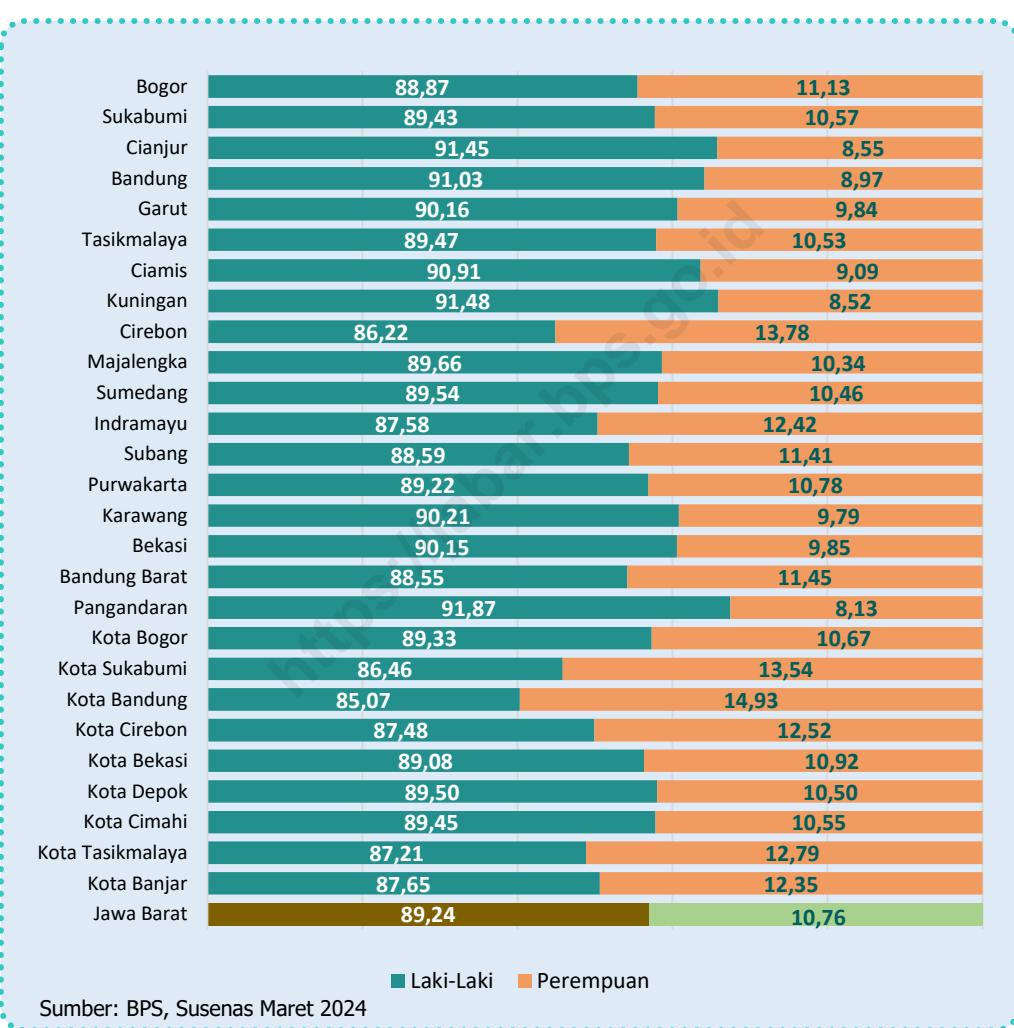
### 3.1.2 Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

Rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berstatus miskin daripada yang dikepalai oleh laki-laki (Rini & Sugiharti, 2016). Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (2003) bahwa sebab-sebab pokok kemiskinan yang memprihatinkan adalah banyaknya wanita yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol mereka terhadap penghasilan suami. Lebih lanjut, Todaro juga mengatakan bahwa akses kaum wanita terbatas untuk menikmati pendidikan dan pekerjaan layak.

Jika dilihat dari jenis kelamin, pada Maret 2024 terdapat 89,24 persen rumah tangga miskin di Jawa Barat yang memiliki kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan 10,76 persen rumah tangga miskin di



Jawa Barat kepala rumah tangganya perempuan. Pada Gambar 7 terlihat bahwa 14,93 persen rumah tangga miskin di Kota Bandung memiliki KRT berjenis kelamin perempuan. Kota Bandung memiliki persentase KRT miskin berjenis kelamin perempuan tertinggi di Jawa Barat. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran memiliki persentase KRT miskin berjenis kelamin perempuan terendah yaitu sebesar 8,13 persen.



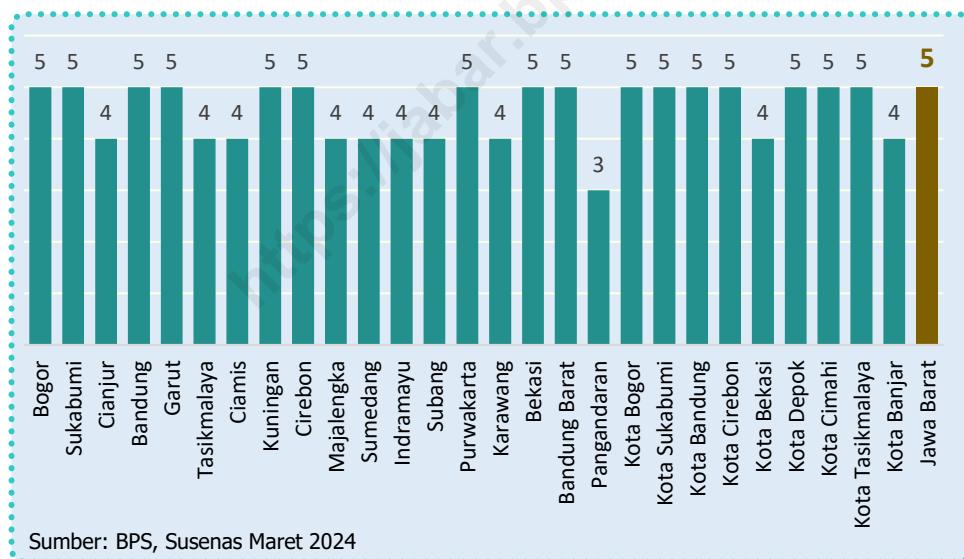
**Gambar 7 Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



### 3.1.3 Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga

Penelitian yang dilakukan oleh Rini & Sugiharti (2016) menemukan bahwa semakin banyak anggota suatu rumah tangga maka semakin besar kemungkinan mereka untuk jatuh miskin. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah anggota rumah tangga, maka pendapatan/pengeluaran per kapita yang didistribusikan di antara anggota rumah tangga akan semakin kecil.

Pada Maret 2024 tercatat rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di Jawa Barat adalah 5 (lima) orang. Di level kabupaten/kota terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin berkisar antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang. Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin paling sedikit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang. Selengkapnya pada Gambar 8.



Sumber: BPS, Susenas Maret 2024

**Gambar 8 Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (orang), 2024**



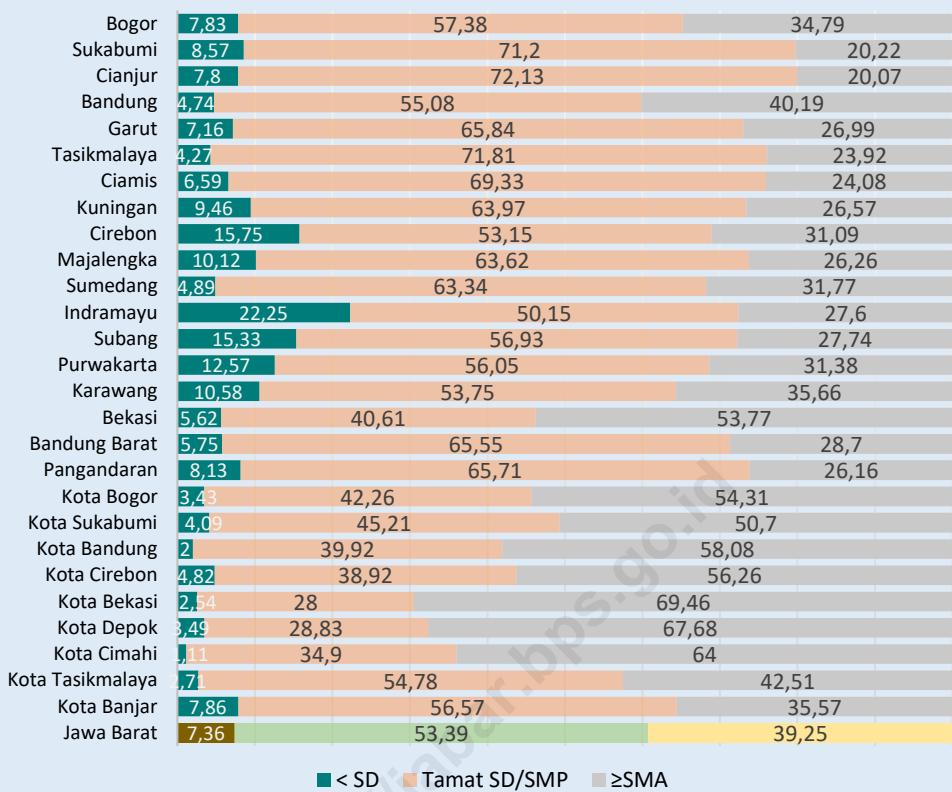
## 3.2 Karakteristik Sosial Ekonomi

### 3.2.1 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan angka kemiskinan. Wei (1994) mengemukakan bahwa dalam upaya mengatasi kemiskinan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan peningkatan pada kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan investasi pada modal manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat mempromosikan manfaat ekonomi. Pendidikan sebagai salah satu dimensi dari kualitas sumber daya manusia adalah pintu masuk utama untuk mengatasi kemiskinan karena melalui pendidikan seseorang akan dapat bersaing di dunia kerja. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin.

Pada tahun 2024, sebanyak 53,39 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Jawa Barat hanya tamat SD/SMP, 39,25 persen tamat SMA atau lebih tinggi dan 7,36 persen tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah. Jika kita lihat keadaan kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2024, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SMA ke atas tertinggi ada di Kota Bekasi yaitu sebesar 69,46 persen. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 20,07 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.

Berdasarkan gambaran tersebut perlu upaya lebih bagi pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi penduduk miskin agar dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi. Penduduk miskin yang mempunyai pendidikan menengah ke atas dapat diberikan peluang lebih luas oleh pemerintah daerah untuk dapat terlibat dalam roda perekonomian sehingga diharapkan mampu keluar dari kemiskinan.



Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024

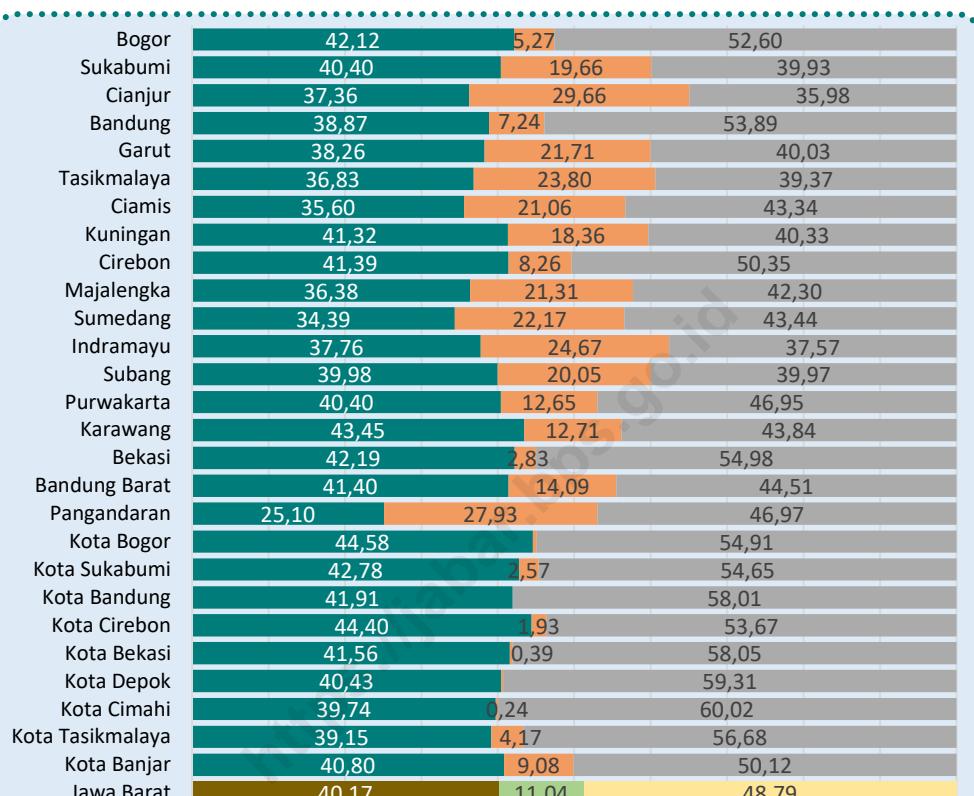
**Gambar 9 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**

### 3.2.2 Karakteristik Ketenagakerjaan

Status bekerja menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin diantaranya adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga serta status pekerjaan. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang



bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Dalam publikasi ini lapangan pekerjaan yang disajikan hanya dibagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu pertanian dan bukan pertanian.



■ Tidak Bekerja<sup>1</sup> ■ Bekerja di Sektor Pertanian ■ Bekerja Bukan di Sektor Pertanian

Catatan: <sup>1</sup> termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024

**Gambar 10 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Jawa Barat yang tidak bekerja sebanyak 40,17 persen. Sebanyak 11,04 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian dan 48,79 persen bekerja bukan di sektor pertanian.

Jika kita lihat pada Gambar 10, kondisi Maret 2024 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja terbanyak terdapat di Kota Bogor yaitu sebanyak 44,58 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Pangandaran yaitu 25,10 persen. Selain itu dapat dilihat bahwa hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian lebih sedikit dibandingkan yang bekerja bukan di sektor pertanian.

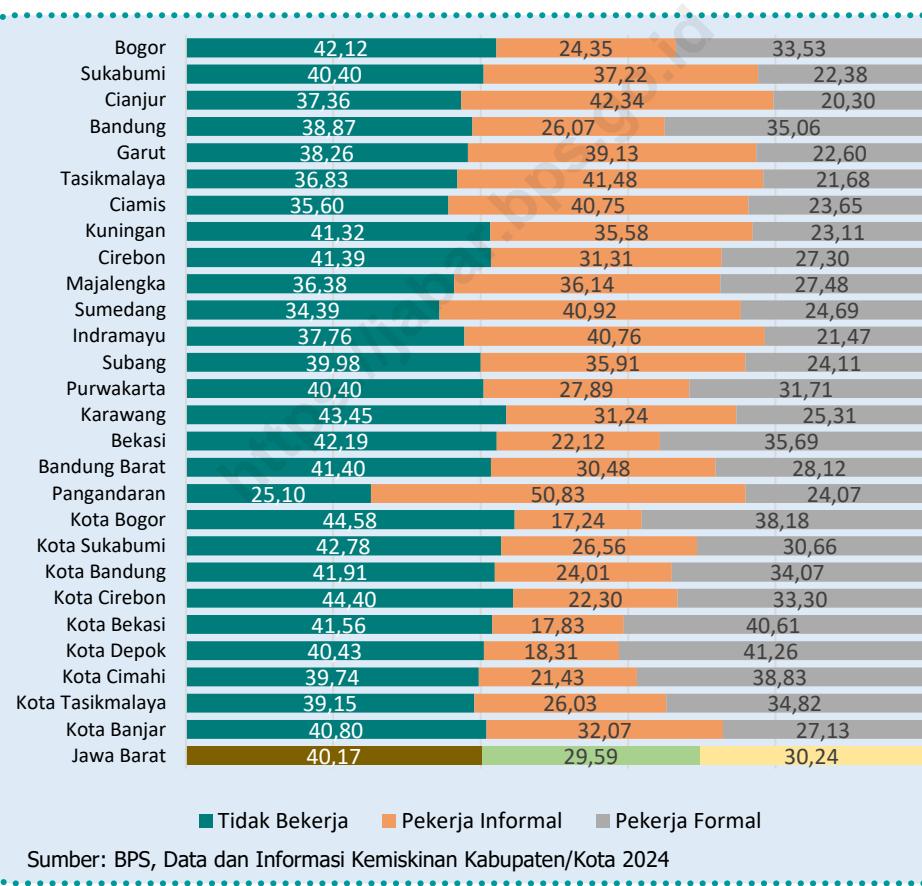
Dikarenakan sering diasosiasikan dengan sumber daya berkualitas rendah, penduduk yang memiliki penghasilan rendah dan hidup dalam kemiskinan cenderung hanya memiliki akses terhadap sektor informal dan kemudian menjadi pekerja informal. Pada mayoritas negara berkembang, salah satunya Indonesia, kemiskinan juga masih terikat dengan orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan. Orang yang miskin akan bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Rahman & Aulia, 2021). Pekerjaan yang bersifat informal menjadi pekerjaan yang umum dilakukan oleh para pekerja miskin dan menjadi strategi bertahan hidup bagi orang miskin.

Pekerja menurut status pekerjaan terbagi atas pekerja formal dan informal. BPS menggunakan *proxy* status pekerjaan utama untuk mengategorisasi pekerja formal dan informal. Status pekerjaan informal adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pekerja bebas ditambahkan ke dalam kategori pekerja informal lantaran sifat pekerja bebas



di Indonesia yang umumnya bersifat informal seperti produktivitasnya rendah, upah tidak memadai, dan kondisi kerja yang relatif buruk.

Pada Maret 2024, sebanyak 29,59 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Jawa Barat berstatus sebagai pekerja informal dan 30,29 persen merupakan pekerja formal. Persentase penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang berstatus sebagai pekerja informal tertinggi di Kabupaten Pangandaran kemudian diikuti oleh Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya masing-masing sebesar 50,83 persen, 42,34 persen dan 41,48 persen.



**Gambar 11 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



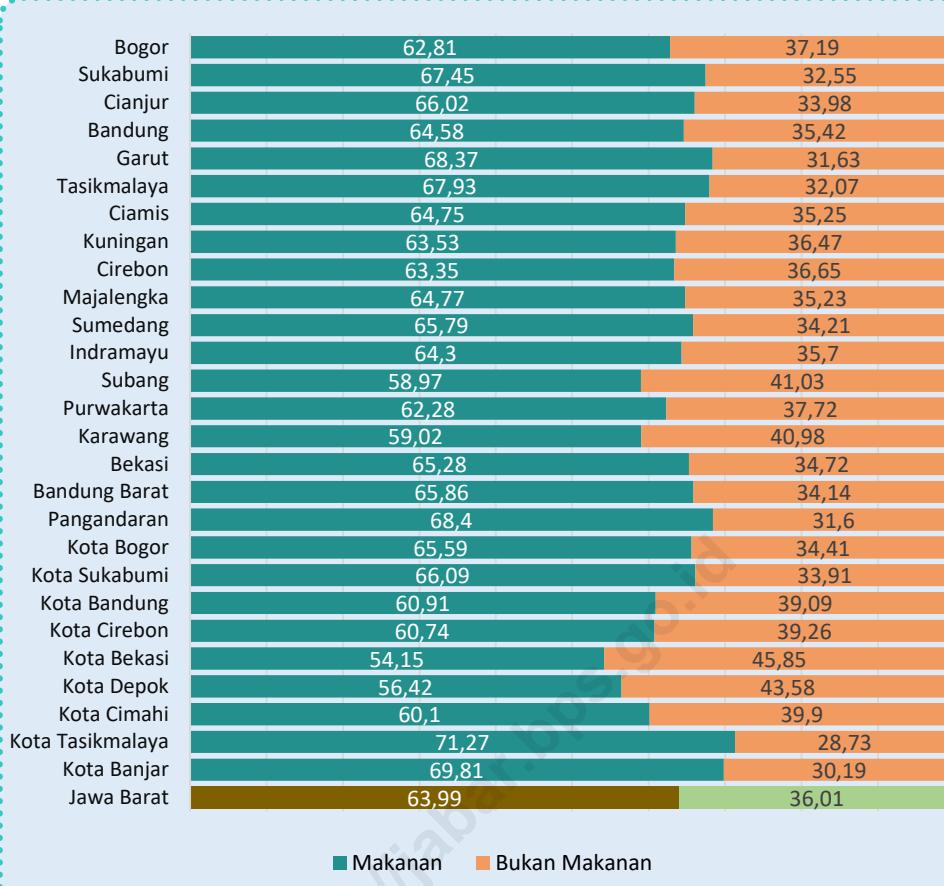
### 3.2.3 Pengeluaran per Kapita per Bulan

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat juga berdasarkan status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya).

Pada Maret 2024, sebanyak 63,99 persen pengeluaran per kapita rumah tangga miskin adalah untuk komoditi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan menjadi prioritas utama dalam pengeluaran rumah tangga miskin. Di sisi lain, pengeluaran untuk komoditas bukan makanan, hanya sebesar 36,01 persen.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, alokasi pengeluaran rumah tangga miskin bervariasi. Namun di seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa pengeluaran makanan masih mendominasi dalam alokasi pengeluaran rumah tangga miskin. Pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada rumah tangga miskin tahun 2024 paling kecil di Kota Bekasi sebesar 54,15 persen, sedangkan yang terbesar di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 71,27 persen.

Ketika sebagian besar pendapatan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan pangan, rumah tangga miskin seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya yang juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan, menghambat kesempatan untuk mobilitas sosial, dan mengurangi potensi generasi masa depan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.



Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024

**Gambar 12 Persentase Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Miskin Menurut Penggunaan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**

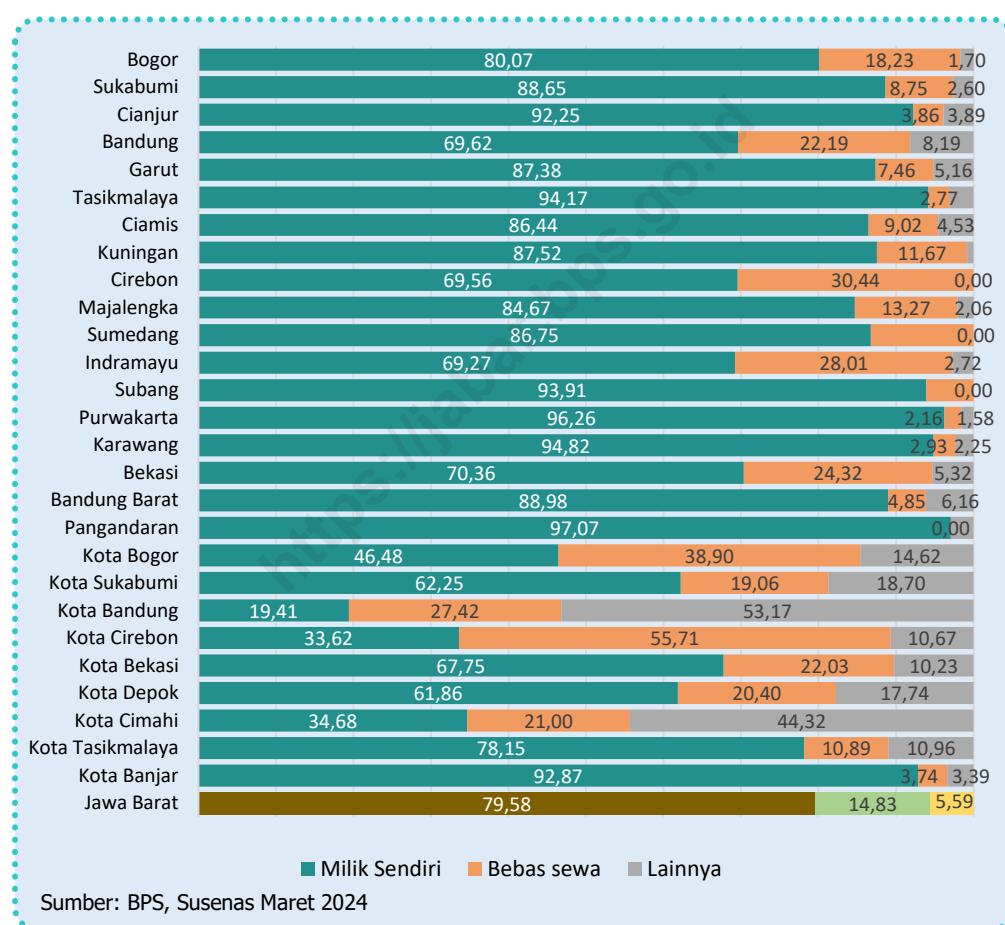
### 3.3 Karakteristik Perumahan

#### 3.3.1 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Sebanyak 79,58 persen rumah tangga miskin di Jawa Barat pada Maret tahun 2024 menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, 14,83 persen menempati bangunan tempat tinggal dengan status bebas sewa dan 5,59 persen menempati bangunan tempat tinggal dengan status lainnya (kontrak/sewa/dinas/lainnya). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar



rumah tangga miskin memiliki tempat tinggal yang relatif stabil, meskipun dalam banyak kasus, kondisi fisik rumah tersebut mungkin tidak mencerminkan kualitas yang ideal atau layak huni karena kemampuan terbatas rumah tangga miskin dalam memperoleh rumah dengan fasilitas dan struktur yang lebih baik. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota persentase rumah tangga miskin yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri terendah di Kota Bandung yaitu sebesar 19,41 persen dan tertinggi di Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar 97,07 persen (Gambar13).

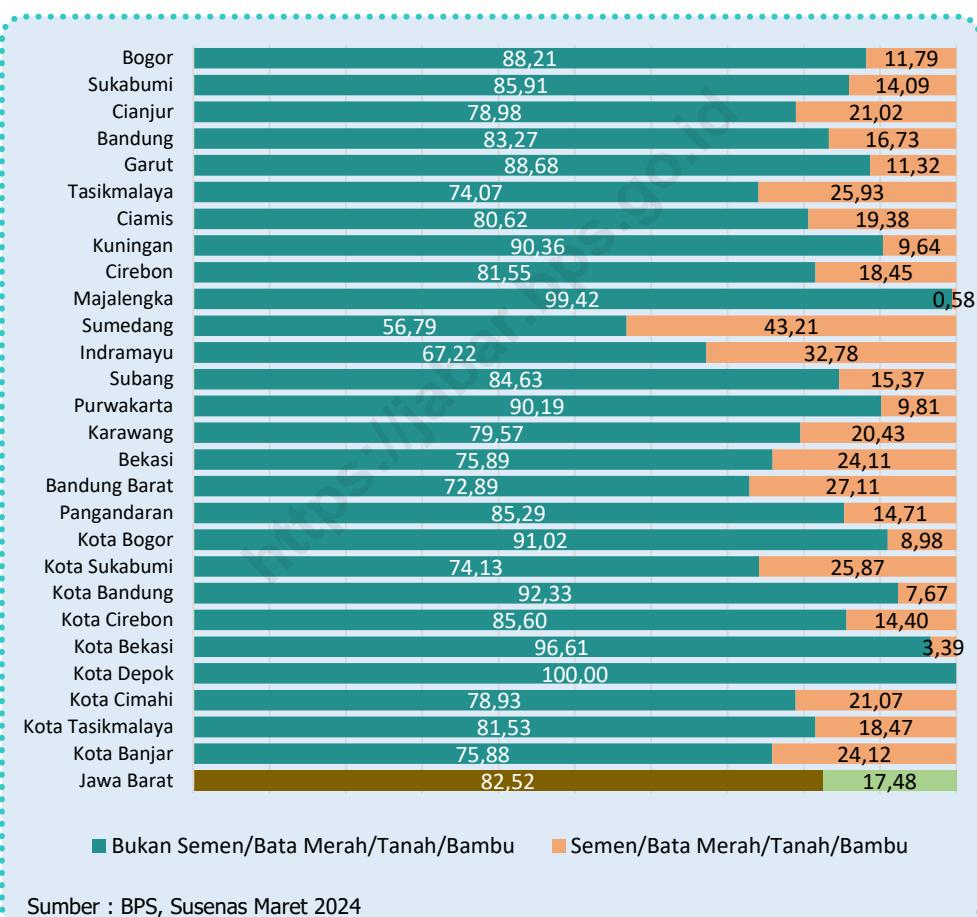


**Gambar 13 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



### 3.3.2 Jenis Lantai, Dinding dan Atap Terluas

Berdasarkan data Susenas Maret 2024, tercatat bahwa 82,52 persen rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Barat tinggal di bangunan dengan jenis lantai terluas bukan semen/bata merah/tanah/bambu. Sementara itu, persentase rumah tangga miskin yang tinggal di bangunan dengan lantai terluasnya adalah semen/bata merah/tanah/bambu terbanyak adalah di Kabupaten Sumedang, yaitu sebesar 43,21 persen, kemudian diikuti Kabupaten Indramayu sebesar 32,78 persen.

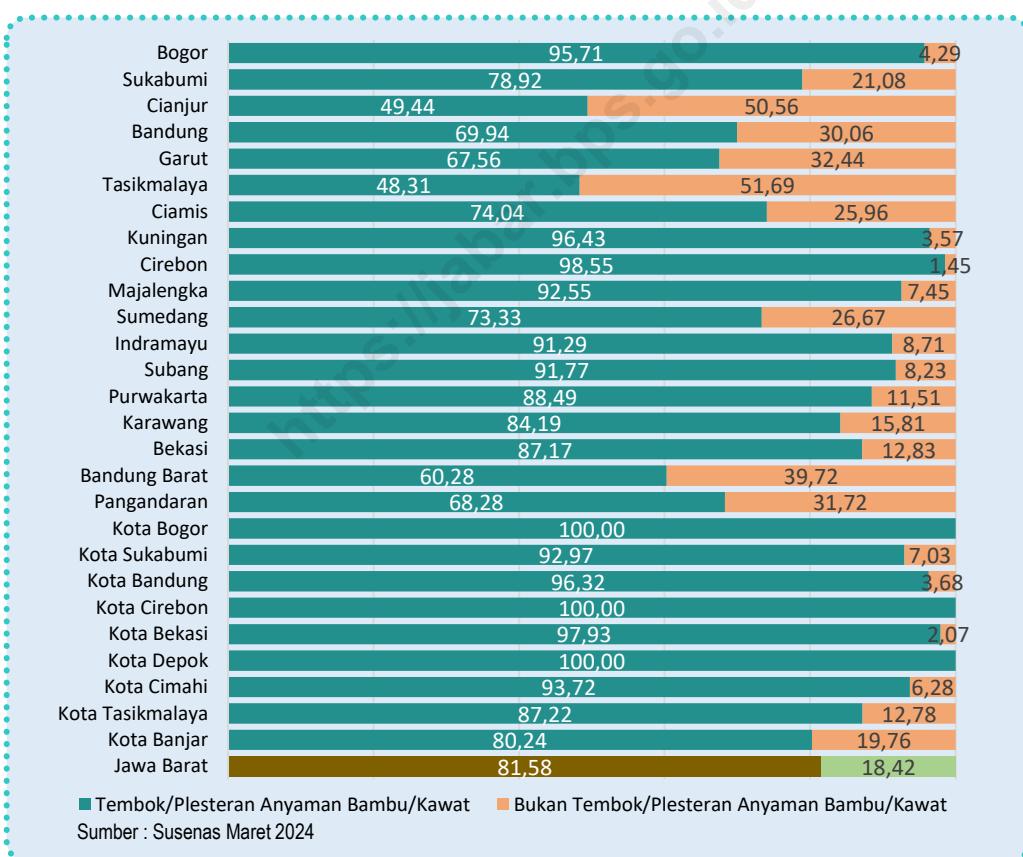


Sumber : BPS, Susenas Maret 2024

**Gambar 14 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



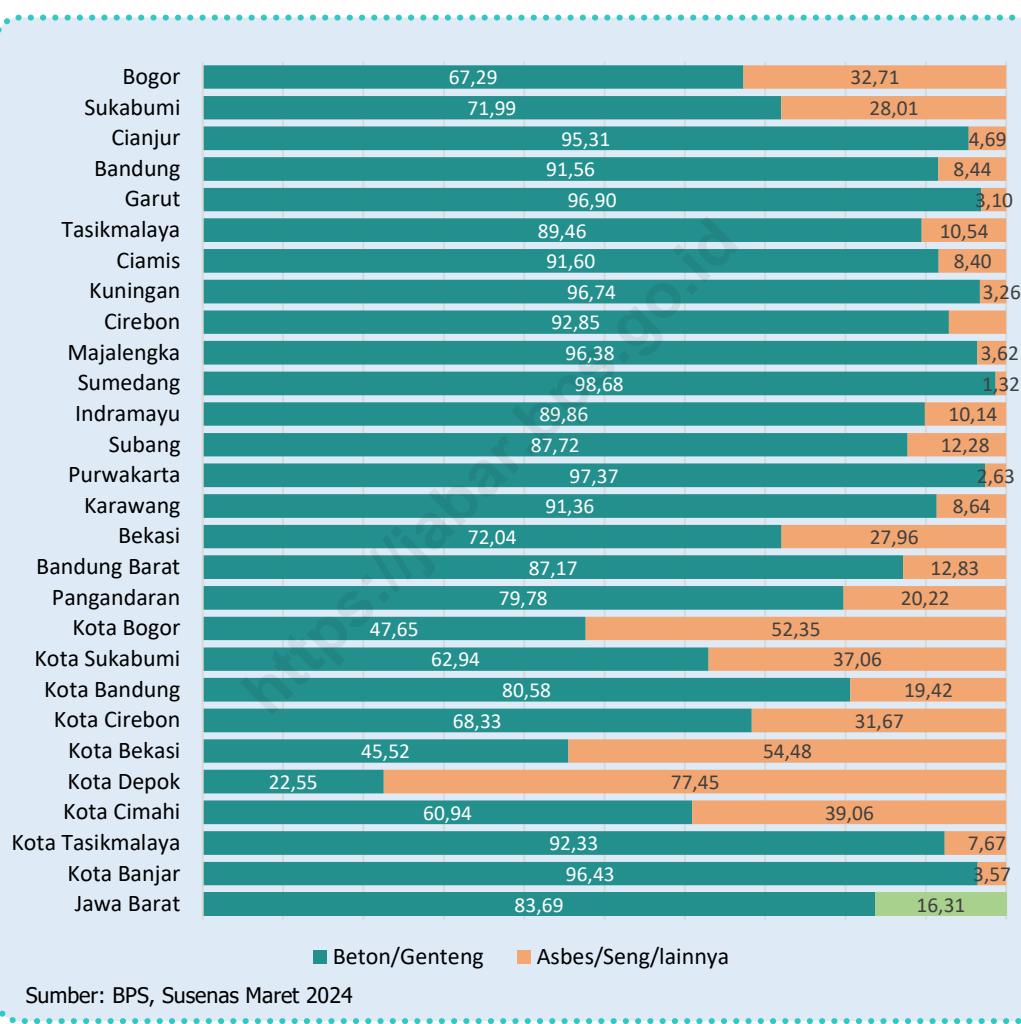
Pada Maret 2024, sebanyak 81,58 persen rumah tangga miskin di Jawa Barat menempati bangunan dengan dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat. Hampir di seluruh kabupaten/kota, persentase rumah tangga miskin yang tinggal di bangunan dengan dinding terluasnya berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat lebih banyak jika dibandingkan yang tinggal di bangunan dengan dinding bukan tembok/plesteran anyaman bambu/kawat. Sementara itu, persentase rumah tangga miskin yang dinding terluasnya tembok/plesteran anyaman bambu/kawat paling sedikit adalah di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 48,31 persen kemudian diikuti oleh Kabupaten Cianjur sebesar 49,44 persen (Gambar 15).



**Gambar 15 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



Gambar 16 menunjukkan bahwa sebanyak 83,69 persen rumah tangga miskin di Jawa Barat telah menggunakan atap beton/genteng sebagai atap terluas tempat tinggalnya. Hanya tiga kota yang atap terluasnya tidak didominasi beton/genteng yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok. Kota Depok memiliki persentase rumah tangga miskin terendah yang atap tempat tinggalnya beton atau genteng, yaitu 22,55 persen.

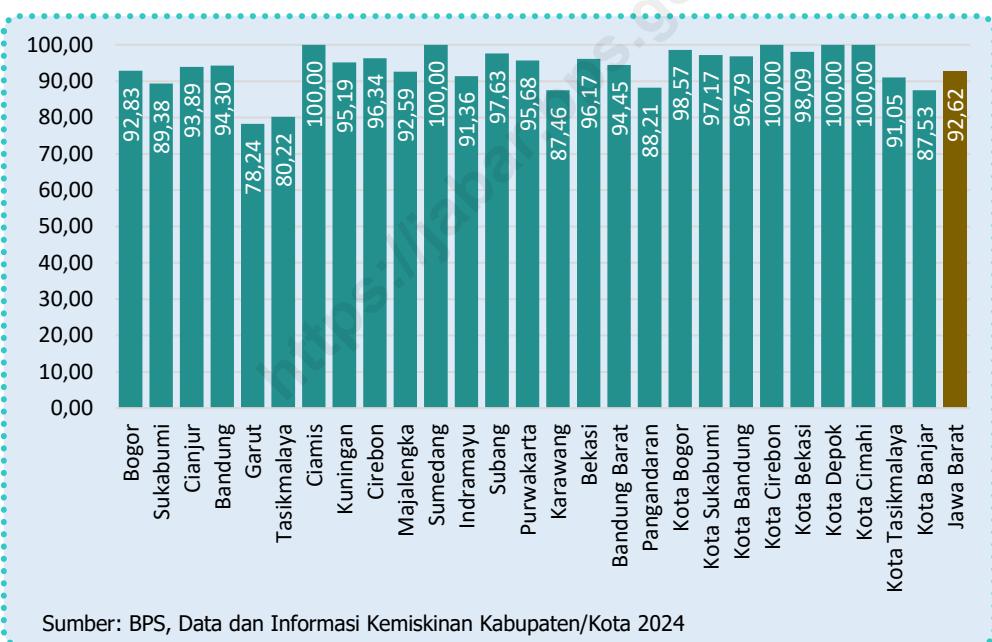


**Gambar 16 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



### 3.3.3 Penggunaan Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal dan jamban umum/tidak ada fasilitas. Pada Maret 2024, persentase rumah tangga miskin di Jawa Barat yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 92,62 persen. Jika kita cermati di kabupaten/kota di Jawa Barat, hampir seluruh rumah tangga miskin di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Cimahi telah menggunakan jamban sendiri/bersama. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama terendah terdapat di Kabupaten Garut sebesar 78,24 persen.



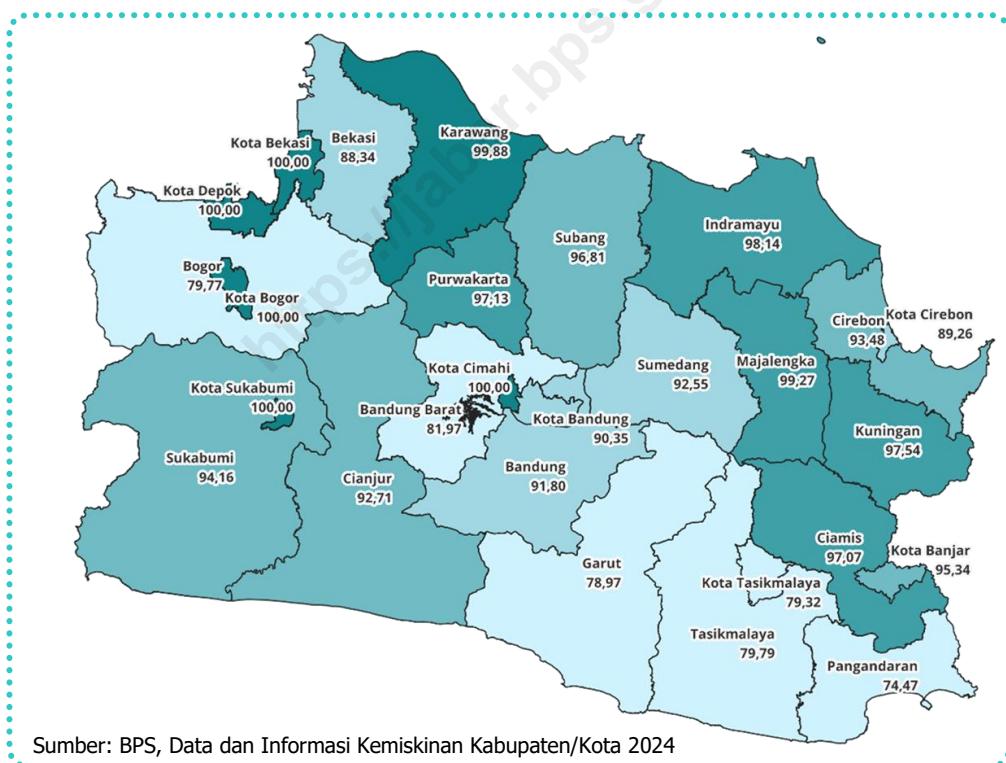
Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024

**Gambar 17 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



### 3.3.4 Sumber Air

Air layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Air layak pada umumnya digunakan pada aktivitas minum dan memasak setiap rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan air layak dapat mendukung keberlangsungan hidup setiap rumah tangga. Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan rumah tangga untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dan lain-lain yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.



**Gambar 18 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**



Pada Maret 2024 tercatat sebanyak 90,64 persen rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Barat telah menggunakan air layak. Pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak paling sedikit terdapat di Kabupaten Pangandaran, yaitu sebesar 74,47 persen. Sedangkan penggunaan air layak yang tertinggi terdapat di Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Cimahi yang sudah mencapai 100,00 persen (Gambar 18).

https://jabar.bps.go.id

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2024). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024*. Jakarta: BPS.
- Rahman, A., & Aulia, L. A. (2021). *Kajian Karakteristik Pekerja Miskin. Seminar Nasional Official Statistics 2020*, 2020(1), 1254–1260. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.681>
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 01(2), 17–33.
- Todaro, P.M. & Smith S. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga.
- Wei, L. (1994). *Human resources development and poverty alleviation: A study of 23 poor counties in China*. *Asia-Pacific Population Journal*, 9(3), 1–9.



# LAMPIRAN







**Lampiran 1**  
**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat**  
**(rupiah/kapita/bulan), 2019–2024**

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor	373.799	402.877	418.483	443.787	482.174	513.512
2	Sukabumi	309.676	328.284	342.094	357.636	392.705	416.751
3	Cianjur	350.760	371.699	387.631	406.829	437.327	466.509
4	Bandung	345.177	367.403	378.819	398.884	426.069	455.636
5	Garut	301.202	310.437	320.050	335.134	367.681	393.464
6	Tasikmalaya	311.848	323.880	333.909	347.917	378.958	400.148
7	Ciamis	363.750	378.108	389.676	405.294	442.108	467.497
8	Kuningan	340.775	352.358	358.069	371.665	402.767	420.867
9	Cirebon	381.372	393.452	404.635	416.914	451.853	475.046
10	Majalengka	445.184	453.201	466.813	483.319	520.713	547.912
11	Sumedang	342.073	353.092	360.054	371.870	396.573	422.714
12	Indramayu	458.240	474.807	481.754	499.805	532.545	560.159
13	Subang	339.607	351.885	360.691	372.308	404.320	434.161
14	Purwakarta	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187	467.948
15	Karawang	440.347	466.152	494.201	521.158	555.889	597.345
16	Bekasi	481.732	518.667	549.875	579.221	632.811	674.924
17	Bandung Barat	341.307	362.212	374.470	393.956	426.355	455.325
18	Pangandaran	367.748	382.264	394.101	411.174	447.242	470.068
19	Kota Bogor	513.343	547.399	571.425	608.949	661.384	699.861
20	Kota Sukabumi	520.742	547.415	567.734	594.118	644.276	678.258
21	Kota Bandung	474.448	500.452	515.396	545.675	591.124	614.707
22	Kota Cirebon	444.574	457.954	467.248	485.613	520.579	545.592
23	Kota Bekasi	617.718	657.953	692.885	731.392	795.965	842.927
24	Kota Depok	644.860	688.194	705.084	744.771	804.984	843.893
25	Kota Cimahi	484.804	511.375	522.281	549.450	590.197	612.567
26	Kota Tasikmalaya	457.899	470.150	480.341	498.711	537.497	565.377
27	Kota Banjar	334.590	344.363	357.210	373.510	408.710	430.590
<b>JAWA BARAT</b>		<b>386.198</b>	<b>410.988</b>	<b>427.402</b>	<b>452.580</b>	<b>495.229</b>	<b>524.052</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019–2024



## Lampiran 2

### Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (ribu orang), 2019–2024

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor	395,03	465,67	491,24	474,74	453,76	446,79
2	Sukabumi	153,30	175,10	194,35	186,28	178,71	175,93
3	Cianjur	207,07	234,47	260,02	246,81	240,06	239,30
4	Bandung	223,21	263,60	269,18	258,61	245,49	239,87
5	Garut	235,19	262,78	281,36	276,67	260,48	259,32
6	Tasikmalaya	159,93	181,52	200,59	194,10	186,87	186,75
7	Ciamis	79,41	91,39	96,60	93,96	90,84	90,79
8	Kuningan	123,16	139,20	143,35	140,25	133,88	131,83
9	Cirebon	217,64	247,94	271,02	266,10	249,18	245,92
10	Majalengka	121,06	138,21	151,14	147,12	138,74	134,58
11	Sumedang	104,18	118,38	126,28	120,12	111,39	108,89
12	Indramayu	191,86	220,31	228,59	225,04	214,74	212,14
13	Subang	129,18	149,81	158,97	155,34	152,33	152,56
14	Purwakarta	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54	81,44
15	Karawang	173,66	195,41	210,78	199,91	187,23	187,77
16	Bekasi	149,43	186,30	202,73	201,14	204,09	204,54
17	Bandung Barat	159,03	179,46	190,77	183,67	179,43	179,70
18	Pangandaran	30,73	35,05	39,07	37,91	36,70	35,95
19	Kota Bogor	63,97	75,04	80,09	79,15	74,95	73,93
20	Kota Sukabumi	21,87	25,42	27,19	26,59	24,96	24,10
21	Kota Bandung	84,67	100,2	112,50	109,82	102,80	101,10
22	Kota Cirebon	26,80	30,61	31,98	31,47	29,49	29,17
23	Kota Bekasi	113,65	134,01	144,12	137,39	129,40	128,84
24	Kota Depok	49,35	60,43	63,86	64,36	61,95	62,60
25	Kota Cimahi	26,91	31,64	32,48	31,16	28,56	27,00
26	Kota Tasikmalaya	76,98	86,13	89,46	87,13	79,37	76,71
27	Kota Banjar	10,07	11,16	13,37	12,73	11,66	11,16
<b>JAWA BARAT</b>		<b>3.399,16</b>	<b>3.920,23</b>	<b>4.195,36</b>	<b>4.070,98</b>	<b>3.888,60</b>	<b>3.848,67</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019–2024



**Lampiran 3**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019–2024**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2	Sukabumi	6,22	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
3	Cianjur	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22	10,14
4	Bandung	5,94	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19
5	Garut	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6	Tasikmalaya	9,12	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7	Ciamis	6,65	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8	Kuningan	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
9	Cirebon	9,94	11,24	12,30	12,01	11,20	11,00
10	Majalengka	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11	Sumedang	9,05	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10
12	Indramayu	11,11	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
13	Subang	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14	Purwakarta	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41
15	Karawang	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16	Bekasi	4,01	4,82	5,21	5,01	4,93	4,80
17	Bandung Barat	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
18	Pangandaran	7,71	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19	Kota Bogor	5,77	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
20	Kota Sukabumi	6,67	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20
21	Kota Bandung	3,38	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22	Kota Cirebon	8,41	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23	Kota Bekasi	3,81	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
24	Kota Depok	2,07	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25	Kota Cimahi	4,39	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26	Kota Tasikmalaya	11,60	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
27	Kota Banjar	5,50	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
<b>JAWA BARAT</b>		<b>6,91</b>	<b>7,88</b>	<b>8,40</b>	<b>8,06</b>	<b>7,62</b>	<b>7,46</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019–2024



**Lampiran 4**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Menurut Kabupaten/Kota  
di Jawa Barat, 2019–2024**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor	0,83	0,83	1,36	1,49	0,97	1,08
2	Sukabumi	0,66	0,80	1,04	0,93	1,01	0,88
3	Cianjur	0,74	1,38	1,83	1,35	1,29	1,58
4	Bandung	1,04	0,92	1,23	0,90	1,10	0,61
5	Garut	0,87	0,97	1,40	1,81	1,17	1,41
6	Tasikmalaya	0,84	0,83	1,57	1,42	1,61	1,01
7	Ciamis	0,76	0,92	0,88	1,07	0,90	0,99
8	Kuningan	1,24	2,41	2,02	2,14	1,87	2,02
9	Cirebon	1,29	1,30	1,94	2,27	1,98	1,69
10	Majalengka	1,39	1,41	2,44	1,55	1,34	1,76
11	Sumedang	1,05	1,72	1,72	1,98	1,64	1,60
12	Indramayu	1,66	2,18	2,46	1,72	2,20	2,05
13	Subang	1,39	1,29	1,93	1,55	1,90	1,63
14	Purwakarta	1,24	1,04	1,31	1,19	1,48	1,37
15	Karawang	1,06	1,28	1,27	1,58	1,06	1,18
16	Bekasi	0,60	0,72	0,91	0,74	0,82	0,70
17	Bandung Barat	1,54	1,40	1,62	1,70	1,54	1,17
18	Pangandaran	0,90	1,32	1,25	1,24	1,28	1,23
19	Kota Bogor	0,72	1,08	1,10	1,27	0,99	0,95
20	Kota Sukabumi	1,08	1,17	1,39	1,27	1,21	0,88
21	Kota Bandung	0,53	0,61	0,78	0,70	0,59	0,60
22	Kota Cirebon	1,23	1,68	2,22	1,34	1,29	1,18
23	Kota Bekasi	0,47	0,60	0,66	0,96	0,63	0,80
24	Kota Depok	0,24	0,29	0,34	0,42	0,24	0,34
25	Kota Cimahi	0,60	0,75	0,93	0,67	0,54	0,83
26	Kota Tasikmalaya	1,98	1,75	2,42	2,34	1,62	1,35
27	Kota Banjar	0,57	0,70	1,19	1,02	0,68	1,03
<b>JAWA BARAT</b>		<b>1,09</b>	<b>1,13</b>	<b>1,47</b>	<b>1,32</b>	<b>1,17</b>	<b>1,21</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019–2024



**Lampiran 5**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Menurut Kabupaten/Kota  
di Jawa Barat, 2019–2024**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor	0,15	0,11	0,35	0,45	0,21	0,26
2	Sukabumi	0,11	0,12	0,23	0,19	0,23	0,20
3	Cianjur	0,11	0,27	0,46	0,27	0,26	0,41
4	Bandung	0,28	0,17	0,34	0,21	0,29	0,09
5	Garut	0,16	0,15	0,29	0,45	0,23	0,29
6	Tasikmalaya	0,12	0,11	0,35	0,28	0,42	0,15
7	Ciamis	0,14	0,16	0,15	0,24	0,17	0,20
8	Kuningan	0,18	0,62	0,46	0,53	0,42	0,53
9	Cirebon	0,26	0,24	0,47	0,59	0,53	0,36
10	Majalengka	0,28	0,25	0,77	0,36	0,26	0,45
11	Sumedang	0,21	0,42	0,46	0,53	0,35	0,45
12	Indramayu	0,40	0,56	0,66	0,48	0,62	0,54
13	Subang	0,34	0,25	0,50	0,41	0,55	0,46
14	Purwakarta	0,28	0,20	0,30	0,25	0,36	0,35
15	Karawang	0,24	0,25	0,29	0,41	0,22	0,28
16	Bekasi	0,15	0,18	0,26	0,18	0,20	0,17
17	Bandung Barat	0,33	0,25	0,32	0,41	0,34	0,23
18	Pangandaran	0,16	0,28	0,27	0,26	0,27	0,29
19	Kota Bogor	0,18	0,26	0,27	0,29	0,20	0,24
20	Kota Sukabumi	0,32	0,22	0,36	0,38	0,31	0,18
21	Kota Bandung	0,14	0,13	0,24	0,17	0,15	0,14
22	Kota Cirebon	0,26	0,40	0,68	0,30	0,29	0,25
23	Kota Bekasi	0,10	0,15	0,16	0,27	0,13	0,21
24	Kota Depok	0,04	0,06	0,07	0,10	0,03	0,07
25	Kota Cimahi	0,14	0,18	0,21	0,14	0,10	0,21
26	Kota Tasikmalaya	0,53	0,39	0,69	0,65	0,32	0,26
27	Kota Banjar	0,10	0,12	0,28	0,28	0,12	0,29
<b>JAWA BARAT</b>		<b>0,24</b>	<b>0,23</b>	<b>0,38</b>	<b>0,33</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019–2024



## Lampiran 6

### Rata-Rata Umur Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (tahun), 2024

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Umur KRT
(1)	(2)	(3)
1	Bogor	48
2	Sukabumi	51
3	Cianjur	50
4	Bandung	49
5	Garut	50
6	Tasikmalaya	53
7	Ciamis	54
8	Kuningan	52
9	Cirebon	50
10	Majalengka	52
11	Sumedang	53
12	Indramayu	51
13	Subang	53
14	Purwakarta	49
15	Karawang	49
16	Bekasi	46
17	Bandung Barat	50
18	Pangandaran	53
19	Kota Bogor	50
20	Kota Sukabumi	51
21	Kota Bandung	50
22	Kota Cirebon	51
23	Kota Bekasi	47
24	Kota Depok	48
25	Kota Cimahi	47
26	Kota Tasikmalaya	51
27	Kota Banjar	53
<b>JAWA BARAT</b>		<b>50</b>

Sumber: Susenas Maret 2024



**Lampiran 7**  
**Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin**  
**Kepala Rumah Tangga dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bogor	88,87	11,13
2	Sukabumi	89,43	10,57
3	Cianjur	91,45	8,55
4	Bandung	91,03	8,97
5	Garut	90,16	9,84
6	Tasikmalaya	89,47	10,53
7	Ciamis	90,91	9,09
8	Kuningan	91,48	8,52
9	Cirebon	86,22	13,78
10	Majalengka	89,66	10,34
11	Sumedang	89,54	10,46
12	Indramayu	87,58	12,42
13	Subang	88,59	11,41
14	Purwakarta	89,22	10,78
15	Karawang	90,21	9,79
16	Bekasi	90,15	9,85
17	Bandung Barat	88,55	11,45
18	Pangandaran	91,87	8,13
19	Kota Bogor	89,33	10,67
20	Kota Sukabumi	86,46	13,54
21	Kota Bandung	85,07	14,93
22	Kota Cirebon	87,48	12,52
23	Kota Bekasi	89,08	10,92
24	Kota Depok	89,50	10,50
25	Kota Cimahi	89,45	10,55
26	Kota Tasikmalaya	87,21	12,79
27	Kota Banjar	87,65	12,35
<b>JAWA BARAT</b>		<b>89,24</b>	<b>10,76</b>

Sumber: Susenas Maret 2024



### Lampiran 8

#### Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024

No.	Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SMP	≥SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	7,83	57,38	34,79
2	Sukabumi	8,57	71,20	20,22
3	Cianjur	7,80	72,13	20,07
4	Bandung	4,74	55,08	40,19
5	Garut	7,16	65,84	26,99
6	Tasikmalaya	4,27	71,81	23,92
7	Ciamis	6,59	69,33	24,08
8	Kuningan	9,46	63,97	26,57
9	Cirebon	15,75	53,15	31,09
10	Majalengka	10,12	63,62	26,26
11	Sumedang	4,89	63,34	31,77
12	Indramayu	22,25	50,15	27,60
13	Subang	15,33	56,93	27,74
14	Purwakarta	12,57	56,05	31,38
15	Karawang	10,58	53,75	35,66
16	Bekasi	5,62	40,61	53,77
17	Bandung Barat	5,75	65,55	28,70
18	Pangandaran	8,13	65,71	26,16
19	Kota Bogor	3,43	42,26	54,31
20	Kota Sukabumi	4,09	45,21	50,70
21	Kota Bandung	2,00	39,92	58,08
22	Kota Cirebon	4,82	38,92	56,26
23	Kota Bekasi	2,54	28,00	69,46
24	Kota Depok	3,49	28,83	67,68
25	Kota Cimahi	1,11	34,90	64,00
26	Kota Tasikmalaya	2,71	54,78	42,51
27	Kota Banjar	7,86	56,57	35,57
<b>JAWA BARAT</b>		<b>7,36</b>	<b>53,39</b>	<b>39,25</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024



**Lampiran 9**  
**Percentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut  
Kabupaten/Kota dan Status Bekerja di Jawa Barat, 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja <sup>1</sup>	Pekerja Informal	Pekerja Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	42,12	24,35	33,53
2	Sukabumi	40,40	37,22	22,38
3	Cianjur	37,36	42,34	20,30
4	Bandung	38,87	26,07	35,06
5	Garut	38,26	39,13	22,60
6	Tasikmalaya	36,83	41,48	21,68
7	Ciamis	35,60	40,75	23,65
8	Kuningan	41,32	35,58	23,11
9	Cirebon	41,39	31,31	27,30
10	Majalengka	36,38	36,14	27,48
11	Sumedang	34,39	40,92	24,69
12	Indramayu	37,76	40,76	21,47
13	Subang	39,98	35,91	24,11
14	Purwakarta	40,40	27,89	31,71
15	Karawang	43,45	31,24	25,31
16	Bekasi	42,19	22,12	35,69
17	Bandung Barat	41,40	30,48	28,12
18	Pangandaran	25,10	50,83	24,07
19	Kota Bogor	44,58	17,24	38,18
20	Kota Sukabumi	42,78	26,56	30,66
21	Kota Bandung	41,91	24,01	34,07
22	Kota Cirebon	44,40	22,30	33,30
23	Kota Bekasi	41,56	17,83	40,61
24	Kota Depok	40,43	18,31	41,26
25	Kota Cimahi	39,74	21,43	38,83
26	Kota Tasikmalaya	39,15	26,03	34,82
27	Kota Banjar	40,80	32,07	27,13
<b>JAWA BARAT</b>		<b>40,17</b>	<b>29,59</b>	<b>30,24</b>

Catatan: <sup>1</sup> termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024



**Lampiran 10**  
**Percentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut**  
**Sektor Bekerja dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja <sup>2</sup>	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	42,12	5,27	52,60
2	Sukabumi	40,40	19,66	39,93
3	Cianjur	37,36	29,66	35,98
4	Bandung	38,87	7,24	53,89
5	Garut	38,26	21,71	40,03
6	Tasikmalaya	36,83	23,80	39,37
7	Ciamis	35,60	21,06	43,34
8	Kuningan	41,32	18,36	40,33
9	Cirebon	41,39	8,26	50,35
10	Majalengka	36,38	21,31	42,30
11	Sumedang	34,39	22,17	43,44
12	Indramayu	37,76	24,67	37,57
13	Subang	39,98	20,05	39,97
14	Purwakarta	40,40	12,65	46,95
15	Karawang	43,45	12,71	43,84
16	Bekasi	42,19	2,83	54,98
17	Bandung Barat	41,40	14,09	44,51
18	Pangandaran	25,10	27,93	46,97
19	Kota Bogor	44,58	0,52	54,91
20	Kota Sukabumi	42,78	2,57	54,65
21	Kota Bandung	41,91	NA	58,01
22	Kota Cirebon	44,40	1,93	53,67
23	Kota Bekasi	41,56	0,39	58,05
24	Kota Depok	40,43	0,26	59,31
25	Kota Cimahi	39,74	0,24	60,02
26	Kota Tasikmalaya	39,15	4,17	56,68
27	Kota Banjar	40,80	9,08	50,12
<b>JAWA BARAT</b>		<b>40,17</b>	<b>11,04</b>	<b>48,79</b>

Catatan: <sup>2</sup> termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

*Not Applicable* (NA) menunjukkan bahwa data tidak dapat ditampilkan karena nilai *relative standar error* (RSE) lebih dari 50 persen

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024



**Lampiran 11**  
**Persentase Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Miskin**  
**Menurut Penggunaan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bogor	62,81	37,19
2	Sukabumi	67,45	32,55
3	Cianjur	66,02	33,98
4	Bandung	64,58	35,42
5	Garut	68,37	31,63
6	Tasikmalaya	67,93	32,07
7	Ciamis	64,75	35,25
8	Kuningan	63,53	36,47
9	Cirebon	63,35	36,65
10	Majalengka	64,77	35,23
11	Sumedang	65,79	34,21
12	Indramayu	64,30	35,70
13	Subang	58,97	41,03
14	Purwakarta	62,28	37,72
15	Karawang	59,02	40,98
16	Bekasi	65,28	34,72
17	Bandung Barat	65,86	34,14
18	Pangandaran	68,40	31,60
19	Kota Bogor	65,59	34,41
20	Kota Sukabumi	66,09	33,91
21	Kota Bandung	60,91	39,09
22	Kota Cirebon	60,74	39,26
23	Kota Bekasi	54,15	45,85
24	Kota Depok	56,42	43,58
25	Kota Cimahi	60,10	39,90
26	Kota Tasikmalaya	71,27	28,73
27	Kota Banjar	69,81	30,19
<b>JAWA BARAT</b>		<b>63,99</b>	<b>36,01</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024



## Lampiran 12

### Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024

No.	Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Bebas Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	80,07	18,23	1,70
2	Sukabumi	88,65	8,75	2,60
3	Cianjur	92,25	3,86	3,89
4	Bandung	69,62	22,19	8,19
5	Garut	87,38	7,46	5,16
6	Tasikmalaya	94,17	2,77	3,06
7	Ciamis	86,44	9,02	4,53
8	Kuningan	87,52	11,67	0,81
9	Cirebon	69,56	30,44	0,00
10	Majalengka	84,67	13,27	2,06
11	Sumedang	86,75	13,25	0,00
12	Indramayu	69,27	28,01	2,72
13	Subang	93,91	6,09	0,00
14	Purwakarta	96,26	2,16	1,58
15	Karawang	94,82	2,93	2,25
16	Bekasi	70,36	24,32	5,32
17	Bandung Barat	88,98	4,85	6,16
18	Pangandaran	97,07	0,00	2,93
19	Kota Bogor	46,48	38,90	14,62
20	Kota Sukabumi	62,25	19,06	18,70
21	Kota Bandung	19,41	27,42	53,17
22	Kota Cirebon	33,62	55,71	10,67
23	Kota Bekasi	67,75	22,03	10,23
24	Kota Depok	61,86	20,40	17,74
25	Kota Cimahi	34,68	21,00	44,32
26	Kota Tasikmalaya	78,15	10,89	10,96
27	Kota Banjar	92,87	3,74	3,39
<b>JAWA BARAT</b>		<b>79,58</b>	<b>5,59</b>	<b>14,83</b>

Catatan: Secara statistik, angka 0 bukan berarti tidak ada satupun kasus pada kategori tersebut

Sumber: Susenas Maret 2024



### Lampiran 13

#### Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024

No.	Kabupaten/Kota	Bukan Semen/Bata Merah/Tanah/Bambu	Semen/Bata Merah/Tanah/Bambu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bogor	88,21	11,79
2	Sukabumi	85,91	14,09
3	Cianjur	78,98	21,02
4	Bandung	83,27	16,73
5	Garut	88,68	11,32
6	Tasikmalaya	74,07	25,93
7	Ciamis	80,62	19,38
8	Kuningan	90,36	9,64
9	Cirebon	81,55	18,45
10	Majalengka	99,42	0,58
11	Sumedang	56,79	43,21
12	Indramayu	67,22	32,78
13	Subang	84,63	15,37
14	Purwakarta	90,19	9,81
15	Karawang	79,57	20,43
16	Bekasi	75,89	24,11
17	Bandung Barat	72,89	27,11
18	Pangandaran	85,29	14,71
19	Kota Bogor	91,02	8,98
20	Kota Sukabumi	74,13	25,87
21	Kota Bandung	92,33	7,67
22	Kota Cirebon	85,60	14,40
23	Kota Bekasi	96,61	3,39
24	Kota Depok	100,00	0,00
25	Kota Cimahi	78,93	21,07
26	Kota Tasikmalaya	81,53	18,47
27	Kota Banjar	75,88	24,12
<b>JAWA BARAT</b>		<b>82,52</b>	<b>17,48</b>

Catatan : Secara statistik, angka 0 bukan berarti tidak ada satupun kasus dan angka 100 tidak berarti seluruh kasus termasuk kategori tersebut

Sumber: Susenas Maret 2024



### Lampiran 14

#### Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Tembok/ Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	Bukan Tembok/Plesteran Anyaman Bambu/Kawat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bogor	95,71	4,29
2	Sukabumi	78,92	21,08
3	Cianjur	49,44	50,56
4	Bandung	69,94	30,06
5	Garut	67,56	32,44
6	Tasikmalaya	48,31	51,69
7	Ciamis	74,04	25,96
8	Kuningan	96,43	3,57
9	Cirebon	98,55	1,45
10	Majalengka	92,55	7,45
11	Sumedang	73,33	26,67
12	Indramayu	91,29	8,71
13	Subang	91,77	8,23
14	Purwakarta	88,49	11,51
15	Karawang	84,19	15,81
16	Bekasi	87,17	12,83
17	Bandung Barat	60,28	39,72
18	Pangandaran	68,28	31,72
19	Kota Bogor	100,00	0,00
20	Kota Sukabumi	92,97	7,03
21	Kota Bandung	96,32	3,68
22	Kota Cirebon	100,00	0,00
23	Kota Bekasi	97,93	2,07
24	Kota Depok	100,00	0,00
25	Kota Cimahi	93,72	6,28
26	Kota Tasikmalaya	87,22	12,78
27	Kota Banjar	80,24	19,76
<b>JAWA BARAT</b>		<b>81,58</b>	<b>18,42</b>

Catatan: Secara statistik, angka 0 bukan berarti tidak ada satupun kasus dan angka 100 tidak berarti seluruh kasus termasuk kategori tersebut

Sumber: Susenas Maret 2024



### Lampiran 15

#### Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Atap Terluas Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Genteng/Beton	Asbes/Seng/Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bogor	67,29	32,71
2	Sukabumi	71,99	28,01
3	Cianjur	95,31	4,69
4	Bandung	91,56	8,44
5	Garut	96,90	3,10
6	Tasikmalaya	89,46	10,54
7	Ciamis	91,60	8,40
8	Kuningan	96,74	3,26
9	Cirebon	92,85	7,15
10	Majalengka	96,38	3,62
11	Sumedang	98,68	1,32
12	Indramayu	89,86	10,14
13	Subang	87,72	12,28
14	Purwakarta	97,37	2,63
15	Karawang	91,36	8,64
16	Bekasi	72,04	27,96
17	Bandung Barat	87,17	12,83
18	Pangandaran	79,78	20,22
19	Kota Bogor	47,65	52,35
20	Kota Sukabumi	62,94	37,06
21	Kota Bandung	80,58	19,42
22	Kota Cirebon	68,33	31,67
23	Kota Bekasi	45,52	54,48
24	Kota Depok	22,55	77,45
25	Kota Cimahi	60,94	39,06
26	Kota Tasikmalaya	92,33	7,67
27	Kota Banjar	96,43	3,57
<b>JAWA BARAT</b>		<b>83,69</b>	<b>16,31</b>

Sumber: Susenas Maret 2024



## Lampiran 16

### Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024

No.	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bogor	79,77	92,83
2	Sukabumi	94,16	89,38
3	Cianjur	92,71	93,89
4	Bandung	91,80	94,30
5	Garut	78,97	78,24
6	Tasikmalaya	79,79	80,22
7	Ciamis	97,07	100,00
8	Kuningan	97,54	95,19
9	Cirebon	93,48	96,34
10	Majalengka	99,27	92,59
11	Sumedang	92,55	100,00
12	Indramayu	98,14	91,36
13	Subang	96,81	97,63
14	Purwakarta	97,13	95,68
15	Karawang	99,88	87,46
16	Bekasi	88,34	96,17
17	Bandung Barat	81,97	94,45
18	Pangandaran	74,47	88,21
19	Kota Bogor	100,00	98,57
20	Kota Sukabumi	100,00	97,17
21	Kota Bandung	90,35	96,79
22	Kota Cirebon	89,26	100,00
23	Kota Bekasi	100,00	98,09
24	Kota Depok	100,00	100,00
25	Kota Cimahi	100,00	100,00
26	Kota Tasikmalaya	79,32	91,05
27	Kota Banjar	95,34	87,53
<b>JAWA BARAT</b>		<b>90,64</b>	<b>92,62</b>

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2024



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

https://jabar.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
Jl. P.H.H. Mustofa No. 43, Bandung 40124, Jawa Barat  
Telp.: (022) 7272595-7201696 Fax.: (022)7213572  
E-Mail:[bps3200@bps.go.id](mailto:bps3200@bps.go.id)  
Website: <http://jabar.bps.go.id>

ISSN 2655-2248



9 772655 224018